

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wirausaha merupakan potensi pembangunan ekonomi, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kita ditantang bukan hanya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membukalapkan kerja baru seluas-luasnya (Afandi, 2019). Melihat realitas yang berkembang saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika perekonomian global semakin terasa. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dikembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing sehingga kebutuhan akan pelatihan kewirausahaan tidak bisa lagi ditunda atau diabaikan.

Dalam paradigma pesantren, ekonomi menjadi salah satu sektor yang menopang keberlangsungan pendidikan di pesantren, sehingga mau tidak mau pesantren harus turut membaca realitas yang berkembang saat ini. Di beberapa penelitian mengungkap bahwa nilai-nilai kewirausahaan yang diinternalisasi di dalam pondok pesantren adalah nilai yang berbasis ibadah (Rahman et al., 2021). Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan di pesantren merupakan sebuah proses belajar mengajar dengan integrasi nilai spiritual, sosial dan nilai-nilai Alquran, seperti; inovasi, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan toleransi (Hasan et al., 2022).

Ditambah penelitian dari Sari & Hasanah (2022), menurutnya, hal itu diyakini memunculkan etos kerja dan kegairahan jiwa kewirausahaan dan kemandirian santri sehingga sikap mandiri yang dimiliki para santri akan berpengaruh pada pembentukan karakter mereka, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai mengenai bagaimana mereka akan menjalani kehidupan dan bekerja kelak di masyarakat. Dan juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Arfah et al. (2023) bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha sebab seseorang yang

telah menerima pendidikan kewirausahaan akan memiliki keinginan untuk mencobanya sendiri.

Saat ini sudah banyak pesantren yang mengubah paradigmanya dari konservatif menjadi progresif dan pesantren saat ini juga memiliki tanggung jawab mengembangkan potensi santri dengan memberdayakannya dalam segala bidang termasuk aspek ekonomi, merubah teknik dakwah yang dulunya cukup menggunakan cara *bil lisan* berubah menjadi *bil hal* di tengah persoalan masyarakat yang semakin banyak melalui pendalaman di bidang keagamaan dan bidang ekonomi (Arwani & Masrur, 2022). Hal ini terjadi karena kebanyakan orang beranggapan bahwa pesantren itu tempatnya santri menimba ilmu agama saja, bahkan tak sedikit yang menganggap pesantren tempatnya kelompok fanatisme Islam sampai kelompok teroris, sehingga pesantren saat ini ingin mematahkan stigma tersebut.

Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama RI [emis.kemenag.go.id](http://emis.kemenag.go.id) tahun ajaran 2023/2024 terdapat 41.599 pesantren dan 3.143.555 santri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Sedangkan berdasarkan data Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) Kemendikbudristek RI sebanyak 44.359.791 peserta didik di Indonesia. Artinya terdapat 7,08% populasi santri dari jumlah anak yang bersekolah di Indonesia. Ini merupakan jumlah yang belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik di Indonesia, akan tetapi perbandingan antara jumlah santri dengan jumlah institusi pesantren menunjukkan hal yang potensial dimana santri diproyeksikan mampu mengembangkan dan memajukan pesantren, terutama di bidang ekonomi.

Terlepas dari fakta itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk santri menjadi mandiri dalam semua dimensi yang secara teoritis bentuk-bentuk kemandirian mencakup kemandirian emosi, kemandirian intelektual, kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi sendiri mengarah pada kemampuan seseorang dalam bertindak dan mengatur ekonominya sendiri serta pemenuhan kebutuhan ekonomi itu sendiri yang tidak bergantung pada orang lain (Rusdan, 2023).

Untuk menuju kemandirian ekonomi tentu dibutuhkan pondasi keilmuan ekonomi yang kuat baik dari segi literasi ekonomi maupun pendidikan kewirausahaan. Namun, seperti yang diketahui bahwa pesantren yang masih kental dengan kultur tradisionalnya, menurut Wibowo (2021) pendidikan kewirausahaan yang dikemas melalui metode pembelajaran tradisional, tenaga pengajar, tinjauan pustaka dan juga evaluasi tertulis melalui tes terbukti belum mampu mengaktifkan jiwa berwirausaha.

Melihat fakta tersebut dalam rangka mengatasi kurangnya kecakapan berwirausaha santri dalam mengembangkan wirausaha pesantren, maka perlu diadakannya peningkatan literasi ekonomi pada pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren untuk santri dan staf pesantren. Pada penelitian Janah & Harsono (2023) mengatakan bahwa literasi ekonomi pada peserta didik dapat membentuk peserta didik memiliki jiwa yang mudah mengambil keputusan dalam segi ekonomi dan menjadikan warga negara yang mampu memberikan dedikasinya kepada negara melalui keputusan-keputusan ekonominya. Senada dengan hal tersebut, penelitian dari Silvana & Lubis (2021) mengungkapkan juga bahwa pesantren memiliki peran dalam mengatasi hal tersebut sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan perekonomian dan juga menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, serta tentunya mengembangkan ekonomi syariah untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

Pada penelitian Fitriastuti et al. (2023) pondok pesantren dapat menumbuhkan intensi berwirausaha dan mendukung program santri preuner yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru sehingga mampu mengontrol perilaku bisnis dengan memberikan stimulus niat berwirausaha melalui sikap kewirausahaan. Diperkuat lagi dengan hasil temuan dari penelitian Sulistyowati et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan mempengaruhi keberhasilan bisnis yang dipimpin oleh santri melalui nilai-nilai islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, pesantren perlu memiliki unit bisnis sendiri, baik yang berskala mikro, kecil, menengah maupun skala besar. Di Indonesia terdapat sekian pesantren yang memiliki unit bisnis dengan aset mencapai miliaran rupiah. Sekedar menyebut contoh, ada Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, yang telah memiliki BMT dan minimarket, di Bandung ada Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey yang bergerak di bidang agrobisnis, dan produknya kini sudah masuk ke berbagai supermarket dan di Yogyakarta terdapat pesantren yang sudah mengelola tempat wisata (Rusdan, 2023).

Terlebih jika ditilik dari data unit usaha di pesantren menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 90,48% dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha dan sebanyak 2,58% pesantren memiliki 3-5 jenis usaha (Ilham & Zakariya, 2022). Data tersebut menjadi bukti jelas bahwa pesantren mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki potensi yang bagus untuk keberlanjutan pengembangan pesantren di bidang ekonomi.

Di satu sisi yang lain, perlu dipahami juga bahwa angka tersebut jika dirasioakan dengan jumlah seluruh pesantren di Indonesia masih kecil sehinggamasih perlu adanya dorongan kepada pesantren untuk mandiri secara ekonomi. Mengingat pada dasarnya setiap kegiatan tentunya membutuhkan dana yang digunakan untuk operasional sehari-hari dan begitu juga dengan pesantren, yang memiliki banyak agenda kegiatan harian, mingguan atau bulanan yang pasti membutuhkan seperti listrik, air, tempat tinggal yang layak, gaji untuk para pengajar dan yang lainnya, sehingga perlu memikirkan dari mana sumber pendapatan pesantren (Muheramtohad et al., 2022).

Namun, terdapat data dari hasil penelitian yang lain mengatakan hanya 33,4% dari total pesantren di Indonesia yang telah memiliki unit usaha (Irfany, 2022). Angka ini mencerminkan potensi ekonomi pesantren belum sepenuhnya dioptimalisasi oleh sebagian besar pesantren di Indonesia. Padahal pada dasarnya, pesantren dari sisi potensi sumber daya dan unit usaha yang dimilikinya, merupakan aset potensial dalam pembangunan ekonomi. Unit usaha pesantren yang dapat melakukan produksi dan pemasaran produk

halal nasional.

Dalam rangka memberdayakan pesantren dan santri, pemerintah telah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren sebagai bukti bahwa pendidikan pondok pesantren telah diakui dan setara dengan pendidikan formal dengan tetap menjaga ciri khas masing-masing pesantren (Najah, 2022). Selain itu, pada UU tersebut juga dikatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya pesantren dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa dukungan dan fasilitas, paling sedikit adalah bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan. Hal ini menjadi momen penting bagi upaya memaksimalkan kehadiran negara untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya dan landasan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan alokasi sumber daya negara yang besar dalam pengembangan Pesantren.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI, menyambut baik dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 749 tahun 2021 tentang Program Kemandirian Pesantren bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren dan meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren dan santri memiliki potensi membangun kemajuan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Seiring berjalannya kebijakan dan program tersebut, terdapat permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Agama. Berdasarkan sumber data internal Ditpontren Kemenag RI, minimnya kualitas lembaga pesantren untuk pengelolaan bisnis, mayoritas SDM pengelola yang masih relatif pemula dari kalangan santri, dan pesantren merasa kesulitan dalam mengatur anggaran sehingga dana yang dibutuhkan masih belum mencukupi dalam operasional bisnis berjalan. Artinya masih perlu adanya peningkatan pendidikan kewirausahaan dan literasi ekonomi yang ditransfer oleh Kementerian Agama terhadap lembaga pesantren.

Ekonomi dan Pendidikan menjadi dua mata sisi yang saling

berkesinambungan dan merupakan hal yang seksis di kehidupan sehari-hari. Sedangkan pemerintah menjadi titik tengah diantara keduanya. Maka, dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji, meneliti, dan membahas permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Pesantren Melalui Literasi Ekonomi di Indonesia”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap intensi berwirausaha pesantren?
2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha pesantren?
3. Apakah literasi ekonomi dapat memediasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap intensi berwirausaha pesantren?
4. Apakah literasi ekonomi dapat memediasi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha pesantren?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin penulis tujukan, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap intensi berwirausaha pesantren.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha pesantren.
3. Untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap intensi berwirausaha pesantren dimediasi literasi ekonomi.
4. Untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha pesantren dimediasi literasi ekonomi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis dengan mengacu pada sumber teori-teori yang ada terutama ilmu ekonomi pada umumnya dan pada khususnya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan Pondok Pesantren di Indonesia khususnya maupun untuk masyarakat umumnya.
- b. Untuk memberikan wawasan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi pesantren kepada elemen dunia pesantren, mahasiswa, dan masyarakat dalam mengembangkan pesantren pada sektor ekonomi yang sedang atau akan dilaksanakan.
- c. Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan.

*Intelligentia - Dignitas*